



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 6 Januari 2022/Periodik - 2021)

BIDANG : YUDIKATIF
LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG
UNIT KERJA : PENGADILAN TINGGI MANADO

I. DATA PRIBADI

1. Nama : KISWORD
2. Jabatan : HAKIM TINGGI
3. NHK : 269238

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN**

Rp. 2.470.000.000

1. Tanah Seluas 702 m2 di KAB / KOTA SLEMAN, HASIL SENDIRI
Rp. 170.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 268 m2/150 m2 di KAB / KOTA SLEMAN, HASIL SENDIRI Rp. 315.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 537 m2/300 m2 di KAB / KOTA SLEMAN, HASIL SENDIRI Rp. 730.000.000
4. Tanah Seluas 1.005 m2 di KAB / KOTA SLEMAN, HASIL SENDIRI
Rp. 550.000.000
5. Tanah Seluas 1.745 m2 di KAB / KOTA MAGELANG, WARISAN
Rp. 120.000.000
6. Tanah Seluas 1.794 m2 di KAB / KOTA MAGELANG, WARISAN
Rp. 120.000.000
7. Tanah Seluas 1.490 m2 di KAB / KOTA MAGELANG, WARISAN
Rp. 110.000.000
8. Tanah Seluas 1.183 m2 di KAB / KOTA MAGELANG, WARISAN
Rp. 130.000.000
9. Tanah Seluas 3.513 m2 di KAB / KOTA MAGELANG, HASIL SENDIRI Rp. 225.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. 200.000.000

1. MOBIL, HONDA HR-V MINIBUS Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA

Rp. ----



| | | |
|-----------------------------------|-----|---------------|
| D. SURAT BERHARGA | Rp. | ---- |
| E. KAS DAN SETARA KAS | Rp. | 2.431.263.239 |
| F. HARTA LAINNYA | Rp. | ---- |
| Sub Total | Rp. | 5.101.263.239 |
| III. HUTANG | Rp. | ---- |
| IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) | Rp. | 5.101.263.239 |

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.